



17 MAR 1987

KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN NILAI DI INDONESIA :
Laporan Hasil Studi Dokumentasi Pengembangan Kurikulum
dan Bahan Belajar.
(Seri : II A).

DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh :
NOEHI NASUTION

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA
DAN
BALITBANG DIKBUD DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BEKERJASAMA DENGAN
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE
JAKARTA, 1987.

Pancasila sebagai dasar negara yang setelah beberapa tahun merdeka telah terbukti kesaktiannya. Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa dengan beraneka ragam kebiasaan/adat istiadat dan mempunyai bermacam-macam agama tetapi tetap bersatu karena mempunyai satu pandangan hidup yang dilandasi oleh Pancasila.

Bermacam-macam gangguan dari dalam dan dari luar telah berkali-kali terjadi namun berkat kesatuan dan persatuan pandangan hidup, semua gangguan tersebut berakhir dengan kehancuran. Dengan bukti nyata ini, bangsa Indonesia semakin kuat pendiriannya atas kesaktian Pancasila. Inilah sebabnya para pemimpin bangsa yang terdahulu maupun pemimpin bangsa masa kini berupaya untuk mewariskan semangat dan jiwa Pancasila kepada generasi mendatang melalui Pendidikan Moral Pancasila yang harus dipelajari dari tingkat Taman-Kanak-kanak hingga di tingkat Pendidikan Tinggi.

Banyak negara yang sedang berkembang dan yang telah berkembang mengagumi kepribadian bangsa Indonesia, sehingga mereka ingin mempelajari apa, mengapa dan bagaimana pengaruh filsafat Pancasila terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Keinginan tahun ini antara lain datang dari International Development Research Centre, CIWA. Secara khusus Centre ini ingin mengetahui operasionalisasi Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah Indonesia.

Laporan ini adalah salah satu laporan kajian pustaka tentang pelaksanaan Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Dasar sebagai hasil kerjasama penelitian antara Universitas Terbuka dengan IDRC-CIWA. Laporan lain mengenai Pendidikan Moral Pancasila di sekolah menengah yang didasarkan atas kajian pustaka dan pengumpulan data lapangan.

Penulis menyadari adanya kekurangan-kekurangan dalam kajian ini, oleh karena itu masukan untuk menyempurnakan laporan ini sangat diharapkan. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Terbuka dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang memberi kepercayaan kepada penulis untuk ikut berperan serta dalam penelitian Pendidikan Moral Pancasila di Indonesia. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional khususnya Pendidikan Moral Pancasila.

Jakarta, 20 Agustus 1986

Penulis

Noehi Nasution

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Proses Pengembangan Kurikulum	1
BAB II Kurikulum Pendidikan Moral Pancasila di SD ...	8
1. Kedudukan Program RMP	
2. Tujuan RMP	
3. Garis-Garis Besar Pengajaran Program RMP ...	
4. Pengembangan Bahan Belajar RMP	
5. Pengembangan Tenaga dan Infrastruksur	
6. Metodologi Belajar Mengajar RMP	
7. Evaluasi dan Remediasi RMP	
BAB III Kaitan Kurikulum RMP di SD	23
1. Antar Jenjang	
2. Antar Kelas	
3. Antar Disiplin	
BAB IV Kaitan Kurikulum RMP Dengan Bahan Belajar	26
BAB V Keterkaitan Antara kurikulum dan Putusan Lembaga Tertinggi.	28
BAB VI Komentar	30

BAB I PROSES PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pendidikan Moral adalah bidang studi yang mulai muncul pada kurikulum Sekolah Dasar sejak Indonesia merdeka. Pada zaman penjajahan, Pendidikan Moral dan atau Pendidikan Agama tidak pernah diajarkan di sekolah negeri. Dengan kata lain pengembangan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai kemanusiaan maupun kebangsaan bukanlah tanggung jawab sekolah negeri malah sebaliknya perkembangan nilai semacam ini selalu diawasi dan ditekan perkembangannya oleh penjajah. Berkat kesadaran dan rasa tanggung jawablah maka para pejuang kemerdekaan dan pemimpin bangsa jauh sebelum tercapainya kemerdekaan Indonesia telah memikirkan betapa pentingnya peranan pendidikan moral. Tidaklah heran bahwa dalam rencana pelajaran Sekolah Dasar sejak Indonesia merdeka telah mencantumkan bidang studi ini sebagai bidang studi yang harus diberikan di sekolah dan mendapat kedudukan yang utama dibandingkan dengan bidang studi lainnya.

Namun sejak dicantumkannya Pendidikan Moral dalam rencana pelajaran telah pula mengalami pasang naik dan surut sesuai dengan perkembangan kehidupan politik dalam negeri. Gambaran perubahan dapat diikuti pada tabel 1:

Pendidikan Moral mendapat kedudukan dan peranan yang amat penting dalam kurikulum, baik sebagai isi pendidikan yang menjiwai keseluruhan program pengajaran maupun dalam bentuk komposisi mata pelajaran yang dianggap sebagai alat utama pengembangan dalam diri anak.

Penentuan komposisi, kedudukan dan peranan bidang studi yang dianggap relevan dengan dan alat utama untuk melaksanakan pendidikan moral, segi pendidikan ini ternyata bukan hanya merupakan masalah teknis (didaktis/pedagogis) dan etik semata, melainkan telah menjadi masalah ideologis (politik) yang dibahas dan diputuskan pada tingkat lembaga-lembaga tertinggi negara. Hal ini terutama berlaku untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral Pancasila atau segi kependidikan yang langsung berhubungan dengan ideologi Pancasila.

Tabel 1
Perkembangan Pendidikan Moral di Sekolah Dasar

Kurikulum	Pendidikan Moral	Penyebaran Jam Pelajaran di Kelas I s/d VI
1. Rencana Pelajaran HIS - 1927	Tidak ada	-
2. Rencana Pelajaran 1947	a. Pendidikan Agama b. Didikan Budi Pekerti	0, 0, 0, 2, 2, 2 1, 1, 2, 2, 2, 3
3. Rencana Pendidikan 1964	Pendidikan Agama/Budi Pekerti	1, 2, 2, 2, 2, 2
4. Kurikulum 1968	a. Pendidikan Agama b. Pendidikan Kewargaan Negara *	2, 2, 3, 4, 4, 4 2, 2, 4, 4, 4, 4
5. Kurikulum 1975	a. Agama b. Pendidikan Moral Pancasila	2, 2, 2, 3, 3, 3 2, 2, 2, 2, 2, 2
6. Kurikulum 1984	a. Pendidikan Agama b. Pendidikan Moral Pancasila	2, 2, 2, 2, 2, 2

* Termasuk di dalamnya Sejarah dan Ilmu Bumi.

Pendidikan Moral itu mengandung 2 masalah pokok yaitu (1) sumber nilai yang menjadi norma atau standar perilaku manusia dan warga negara Indonesia dan (2) luas daerah (scope) berlakunya nilai-nilai berdasarkan sumbernya masing-masing.

Dari peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang pernah dikeluarkan ternyata ada tiga sumber moral yang dipergunakan dalam menentukan norma perilaku anak-anak Indonesia yang ingin dikembangkan melalui pendidikan moral yaitu:

1. sumber nilai tradisional (etnik) yang diwariskan dari kebudayaan leluhur sumber-sumber bangsa Indonesia;
2. sumber nilai agama;
3. sumber nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pada Rencana Pelajaran 1947, Pendidikan Moral menggunakan dua mata pelajaran sebagai alat formal yaitu (1) Pendidikan Budi Pekerti yang bersumber pada moral tradisional (etnik khususnya Jawa) dan (2) Pendidikan Agama yang bersumber pada masing-masing agama yang diakui pemerintah. Pada Rencana Pendidikan 1964, Pendidikan Budi Pekerti digabungkan dengan Pendidikan Agama dalam bentuk bidang studi Pendidikan Agama/Budi Pekerti. Ke dua bidang studi ini harus mengembangkan dalam diri anak didik nilai-nilai moral yang sesuai terutama dalam akhlak, dan sejauh mungkin menghindari konflik antara nilai-nilai tradisional atau ajaran agama. Nilai moral yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara dimasukkan ke dalam bidang studi Pendidikan Kemasyarakatan.

Menuliskan Pendidikan Agama/Budi Pekerti (dengan menggunakan garis miring) dapat diartikan bahwa Pendidikan Agama dapat digantikan oleh Pendidikan Budi Pekerti. Notasi semacam ini menyebabkan Departemen Agama tidak dapat menyetujuinya. Sehingga dalam kurikulum 1968 Pendidikan Agama dijadikan bidang studi yang berdiri sendiri kembali, sedangkan Budi Pekerti berintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia dan Civics sebagai bidang studi yang bertujuan pembentukan mental dan moral Pancasila.

Kurikulum yang berlaku sebelum Orde Baru khususnya kurikulum 1964 adalah produk dari pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi terpimpin dimana terlihat adanya usaha dari pihak politisi untuk menyelewengkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kekuatan sosial politik berhaluan kiri telah menyusup pada tubuh Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sehingga pelajaran Kewargaan Negara dijadikan sebagai wahana untuk menyebarluaskan Tujuh Bahan Indoktrinasi yang berbau komunis.

Pendidikan Moral yang mengarah pada Pancasila dengan nama bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara resmi muncul dalam Kurikulum 1975, sebenarnya beberapa tahun sebelumnya, setelah ORDEBARU, pelajaran Kewarganegaraan di sekolah telah diarahkan kepada pembentukan manusia Pancasila sejati sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan manusia Pancasila ini dasar hukumnya adalah Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pasal 3, yang menyatakan pendidikan harus:

"Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi UUD 1945".

Sidang MPR pada tahun 1973 memutuskan satu Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 yang mengatakan bahwa:

"Pembangunan di bidang pendidikan di dasarkan atas Filsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila ..."

Selanjutnya Ketetapan tersebut menyebutkan bahwa:

"Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda"

Dengan berpedoman pada ketetapan inilah Pendidikan Budi Pekerti atau Pendidikan Kewargaan Negara dirubah menjadi PMP dan merupakan satu

bidang studi yang berdiri sendiri dalam Kurikulum 1975. Bidang studi RMP dalam periode 1973 - 1978 dikembangkan dan diterapkan secara terus menerus. Sementara itu para wakil rakyat dalam MPR terutama pada sidang-sidang berikutnya yaitu pada tahun 1978 dan 1983 terus merinci dan menyusun strategi terbaik untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Sampai dengan terbitnya Kurikulum 1975 tidak satupun buku-buku yang sifatnya pengembangan moral yang diterbitkan oleh Pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang berkenaan dengan Pendidikan Budi Pekerti pada Kurikulum 1947, Pendidikan Budi Pekerti pada Kurikulum 1964, dan Pendidikan Kewargaan Negara Kurikulum 1968 semua dikarang dan diterbitkan oleh pihak swasta dan diperdagangkan secara bebas. Dari buku-buku yang ditulis perorangan ini Pemerintah mengadakan penilaian untuk mendapatkan buku yang dapat dijadikan buku murid atau buku paket di sekolah. Dalam periode itu tidak menjadi suatu keharusan untuk menggunakan buku paket yang sama untuk semua Sekolah Dasar di seluruh Nusantara. Pada kenyataannya setiap propinsi berhak untuk menentukan pilihan buku yang akan digunakan di sekolah. Tragisnya kebanyakan murid tidak memiliki buku paket karena berbagai hal antara lain daya beli yang sangat terbatas dan langkanya buku tersebut di pasaran.

Dengan diberlakukannya Kurikulum 1975, Pemerintah dengan serta merta mengembangkan dan menerbitkan buku pelajaran untuk semua tingkat pendidikan dasar dan menengah untuk semua bidang studi termasuk buku paket untuk Pendidikan Moral Pancasila. Buku-buku ini ditulis oleh Kelompok Tim Ahli Bidang Studi. Tim ini dibentuk oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan berbagai unsur keahlian seperti ahli bidang studi biasanya berasal dari dosen pada Pendidikan Tinggi, ahli lapangan yang pada umumnya guru berpengalaman, dan ahli dalam bidang kurikulum. Buku pelajaran ini menjadi buku wajib bagi semua sekolah dan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap murid. Dengan kata lain setiap murid memiliki buku tersebut. Kehadiran buku pelajaran ini dirasakan sangat mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar.

Buku pelajaran PMP terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalami satu kali perubahan. Perubahan ini terutama disesuaikan dengan aspirasi politis yang tercermin dalam GBHN dan aspirasi masyarakat. Rumusan GBHN 1983 lebih merinci pelaksanaan pendidikan nasional khususnya Pendidikan Pancasila dibandingkan dengan GBHN sebelumnya (1978). Rumusan tersebut adalah:

GBHN 1978: "Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta".

GBHN 1983: "Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat. Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa".

Dengan adanya penegasan tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) seperti tercantum dalam GBHN 1983, maka beberapa pokok bahasan yang tadinya sudah dimasukkan dalam buku PMP harus diadakan penyesuaian yaitu dengan mengeluarkan pokok bahasan tersebut dari PMP dan memasukkan ke dalam PSPB. Faktor lain yang menyebabkan adanya perubahan buku pelajaran PMP adalah adanya upaya untuk mematangkan konsep-konsep ditinjau dari berbagai aspek seperti agama, kebudayaan, dan penggalangan kesatuan bangsa.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DI SD

Di bawah ini akan diuraikan Kurikulum PMP di SD dimulai dengan melihat kedudukan Program PMP di SD, Tujuan PMP, Garis-Garis Besar Program Pendidikan PMP, Pengembangan Bahan Belajar PMP, Pengembangan Tenaga dan Infra Struktur, Metodologi Belajar Mengajar, dan pada bagian terakhir Evaluasi dan Remediasi.

1. Kedudukan Program Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Dasar

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, PMP semenjak tahun 1975 telah didudukkan pada posisi dan fungsi yang dapat ditinjau dari beberapa segi seperti penempatan bidang studi ini sebagai suatu bidang studi yang berdiri sendiri, tidak merupakan pelajaran yang ditempelkan pada bidang studi lain seperti yang terjadi pada Kurikulum 1964 dan 1968. Sejak dilaksanakannya Kurikulum 1975, PMP telah disetarakan kedudukannya dengan Bahasa Indonesia dan Agama yaitu dalam penentuan kenaikan kelas maupun penentuan kelulusan, dimana masing-masing bidang studi ini tidak boleh kurang dari angka enam.

Juga dalam Tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa PMP memperoleh jumlah jam pelajaran terbesar pada Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan catatan bahwa pada Kurikulum 1968 Pendidikan Kewarganegaraan meliputi juga pelajaran Sejarah dan Ilmu Bumi.

Pada Tabel 2 dapat dilihat proporsi jam pelajaran PMP terhadap jumlah jam pelajaran di setiap kelas mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Proporsi tersebut menunjukkan bahwa proporsi yang terbesar terdapat pada Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Lama satu jam pelajaran tidak berubah sejak tahun 1968 sampai sekarang yaitu 30 menit untuk kelas I dan II dan 40 menit untuk kelas-kelas di atasnya.

Tabel 2
Proporsi Jam Pelajaran dan Lama Satu Jam Pelajaran di Sekolah Dasar

KURIKULUM	SEGI PENDIDIKAN	PROPORSI JAM PELAJARAN/KELAS/MINGGU						LAMA SATU JAM PELAJARAN
		I	II	III	IV	V	VI	
1946	Didikan Budi Pekerti	1/28	1/28	2/35	2/28	2/40	3/41	
1964	Pendidikan Agama/Budi Pekerti	1/25	2/25	2/36	2/36	2/36	2/36	1 jam pelajaran di Kls. I dan II: 30 menit Kls. III s/d VI: 40 menit
1968	Pendidikan Kewargaan Negara (termasuk Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, Civics)	2/28	2/28	4/40	4/40	4/40	4/40	1 jam pelajaran di Kls. I dan II: 30 menit Kls. III s/d VI: 40 menit
1975	Pendidikan Moral Pancasila	2/26	2/26	2/23	2/36	2/36	2/36	1 jam pelajaran di Kls. I dan II: 30 menit Kls. III s/d VI: 40 menit
1984	Pendidikan Moral Pancasila	2/26	2/26	2/23	2/36	2/36	2/36	1 jam pelajaran di Kls. I dan II: 30 menit Kls. III s/d VI: 40 menit

2. Tujuan Pendidikan Moral Pancasila

Seperti telah dikemukakan pada Bab I (Proses Pengembangan Kurikulum) bahwa RMP lahir bersama-sama lahirnya Orde Baru. Sebelumnya tidak ada bidang studi RMP, yang ada ialah Pendidikan Kewargaan Negara, atau Civics, atau Budi Pekerti, dimana pada umumnya pendidikan ini bertujuan untuk mempelajari ketatanegaraan, bentuk negara, nilai-nilai tradisional dan agama, kurang banyak menyinggung hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, pemahaman, dan penghayatan Pancasila.

Pendidikan Pancasila seperti diputuskan dalam Ketetapan MPRS tahun 1966, Ketetapan MPR 1973, 1978 dan 1983 semua bertujuan untuk membentuk manusia pembangunan yang mempunyai pandangan hidup Pancasila. Wadah yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah Pendidikan Moral Pancasila. Ke empat Ketetapan MPR tersebut secara berurutan dan berkesinambungan saling mendukung dan memperkuat serta merinci secara operasional apa yang ditetapkan oleh Majelis pada Sidang Umum sebelumnya. Keputusan-keputusan hukum inilah yang selalu dipedomani untuk menjabarkan kurikulum RMP di sekolah khususnya Sekolah Dasar yang lebih dikenal dengan Kurikulum SD 1968, Kurikulum SD 1975, dan Kurikulum SD 1984. (Dengan catatan bahwa Pendidikan Kewargaan Negara pada Kurikulum 1968 materinya telah disesuaikan dengan materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945).

Pada tabel 3 dicantumkan tujuan RMP di Sekolah Dasar menurut Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tujuan RMP pada Kurikulum 1968 sifatnya masih umum belum menjurus pada pengembangan sila demi sila dari Pancasila seperti pada Kurikulum 1984. Sebagai contoh dari 5 butir tujuan RMP pada Kurikulum 1968, penjabarannya masih terlalu umum antara lain butir ke dua berbunyi:

"Memupuk dan mengembangkan rasa kekeluargaan dalam hidup sebagai anggota masyarakat dan kasih terhadap sesama manusia".

Penjabaran ini diperkirakan penjabaran sila ke dua Pancasila.

Tabel 3
Tujuan RMP SD Dalam Kurikulum 1968, 1975 dan 1984

KURIKULUM 1968	KURIKULUM 1975	KURIKULUM 1984
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan, memupuk, dan mengembangkan rasa beragama dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saling hormat menghormati sesama insan beragama. 2. Memupuk dan mengembangkan rasa kekeluargaan dalam hidup sebagai anggota masyarakat dan kasih terhadap sesama manusia. 3. Memupuk dan mengembangkan rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air yang sehat. 4. Memupuk dan mengembangkan kemampuan anak didik untuk menjadi warga negara yang demokratis, yang berbudi luhur, cakap dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara serta mendahulukan kewajiban dari pada haknya. 	<p>Ilmu Pengetahuan Sosial berfungsi pembinaan kecerdasan dan pengetahuan untuk dapat menelaah masalah-masalah kemasyarakatan secara ilmiah. Pendidikan Moral Pancasila terutama dititikberatkan pada pemahaman dan penghayatan siswa akan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.</p> <p>Ini berarti bahwa tujuan daripada Pendidikan Moral Pancasila adalah membimbing para generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila daripadanya.</p> <p>Tujuan Kurikuler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Murid mengerti arti Ketuhanan Y.M.E. 2. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 29 UUD'45*) 3. Murid dapat mengerti prinsip-prinsip dasar hak-hak azasi manusia, serta tanggung jawab yang terjalin dengan hak-hak tersebut. 	<p>Tujuan Kurikuler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Persatuan Indonesia. 4. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan. 5. Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. <p>Tujuan RMP adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. 2. Meletakkan dan menanamkan pola berfikir yang sesuai dengan Pancasila dan watak Indonesia. 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik.

5. Menanamkan, menupuk, dan mengembangkan sifat dan sikap kewiraan (keberanian berdasarkan kebenaran dan keadilan)
 4. Murid mengerti prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD'45.
 5. Murid mengerti arti kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
 6. Murid mengetahui, mengenal kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan rasa Bhinneka Tunggal Ika.
 7. Murid mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya.
 8. Murid mengetahui dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
 9. Murid mengerti dan mampu menggunakan dasar-dasar hak kewargaan negara.
 10. Murid memahami bentuk dan dasar negara RI sehingga murid mampu berpartisipasi sebagai warga negara.
 11. Murid mengerti dan mempraktekkan prinsip keadilan sosial kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- *)
1. Negara berdasarkan atas Ketuhana YMi.
 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Menggugah kesadaran anak didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila.
 5. Memberikan motivasi agar dalam setiap tingkah lakunya bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Kurikulum 1975 perumusan penjabaran sila ke dua lebih operasional yaitu:

"Murid dapat mengerti prinsip-prinsip dasar hak-hak azasi manusia, serta tanggung jawab yang terjalin dengan hak-hak tersebut".

Penjabaran yang lebih operasional sila ke dua Pancasila terdapat pada Kurikulum 1984 yang berbunyi:

"Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab", dan dalam P4 (Ekaprasetya Pancakarsa) jabaran operasionalnya adalah:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro.
4. Tidak senena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa rumusan penjabaran setiap sila dari Pancasila pada Kurikulum 1984 lebih terinci dan operasional daripada penjabaran dalam Kurikulum 1975 atau Kurikulum 1968. Di samping itu penjabaran sila ke lima Pancasila tidak secara nyata dibaca pada 5 butir tujuan RMP pada Kurikulum 1968.

Selain adanya perbedaan dalam rumusan penjabaran atas sila demi sila juga terdapat perbedaan dalam lingkup materi, misalnya pada Kurikulum 1975 terdapat dua butir tujuan yang mencantumkan unsur UUD 1945 yaitu tujuan nomor 2 dan 4, sedangkan pada Kurikulum 1984 keduanya ini dimasukkan sebagai penjabaran dalam Eka Prasetya Pancakarsa yaitu butir I.2, I.3, dan I.4 serta II.4, II.5, II.8. Dari segi upaya pengembangan sikap ke tiga kurikulum tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam proses pengembangannya. Pada Kurikulum 1968 proses yang

ditempuh melalui kegiatan "menanamkan dan mengembangkan" sedangkan pada Kurikulum 1975 prosesnya adalah dengan "mengetahui, memahami, dan melaksanakan" dan Kurikulum 1984 melalui proses "memahami, menghayati, dan mengamalkan". Adanya pergeseran proses pengembangan ini adalah sebagai akibat dari praktek proses belajar mengajar di sekolah yaitu pada periode Kurikulum 1968 dan Kurikulum 1975 pengembangan sikap belum tercapai dengan baik karena dalam proses belajar mengajar terdapat kecenderungan bahwa ranah kognitif lebih banyak ditekankan daripada ranah afektif. Diharapkan dengan tujuan Pendidikan Moral Pancasila yaitu "memahami, menghayati, dan mengamalkan" pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah lebih menekankan pada ranah afektif.

Akhirnya Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kata Pengantarnya pada buku Pedoman Metode Penyajian RMP dan Penerapannya mengatakan:

- a. Tujuan Kurikulum adalah kelima sila dalam Pancasila sedangkan Tujuan Instruksional Umum adalah ketiga puluh enam butir P4.
- b. Sasaran akhir RMP adalah dihayati dan diamalkannya Pancasila oleh setiap anak didik/lulusan di dalam kehidupan bermasyarakat/bernegara.
- c. Materi RMP diambil dari pokok bahasan dalam buku paket RMP untuk SD yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) RMP

Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mulai diperkenalkan dalam sistem pendidikan nasional adalah pada waktu Kurikulum 1975 diberlakukan. GBPP mengandung perincian tentang:

- a. Tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran selama masa pendidikan di SD. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikulum.
- b. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam setiap satuan pelajaran dinyatakan dalam bentuk tujuan instruksional umum.

- c. Pokok-pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pengajaran bagi para siswa, agar mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- d. Urutan penyampaian bahan-bahan pengajaran tersebut dan tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya, dan dari caturwulan satu ke caturwulan berikutnya.

Kurikulum sebelumnya seperti Kurikulum 1968 belum menggunakan GBPP namun dalam kurikulum tersebut sudah dicantumkan hal-hal yang berkenaan dengan tujuan instruksional umum, bahan yang harus diberikan, dan kegiatan yang harus dilaksanakan yang pada dasarnya adalah metoda mengajar yang harus diterapkan. Bahan yang diajarkan dalam Kurikulum 1968 berkelanjutan dan berkesinambungan.

Penyajian dalam GBPP seperti digambarkan di atas selain dirinci secara mudah dapat dilihat tujuan, pokok pembahasan atau sub pokok bahasan, metoda, sarana/buku sumber, dan teknik penilaian yang harus diberikan pada waktu tertentu, misalnya di kelas VI caturwulan 3. GBPP dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan guru untuk membuat Satuan Pelajaran. Komponen Satuan Pelajaran sudah tertera dalam GBPP, guru tinggal membuat rincian yang lebih operasional, misalnya dari Tujuan Instruksional Umum dirinci menjadi Tujuan Instruksional Khusus, metode mengajar seperti "penugasan" dirinci dengan penugasan kemana, bilamana dan bagaimana, dan jenis penilaianpun dirinci dengan pengembangan alat ukur sesuai dengan pokok bahasan/sub pokok bahasan yang ingin diukur tingkat penguasaannya. Dari GBPP dapat dilihat bahwa pendekatan penyajian bahan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat spiral (spiral approach). Sebagai contoh:

1. Pada Kurikulum 1975 tercantum pokok bahasan Hubungan Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa Pengasih Penyayang. Pokok bahasan ini dibicarakan di kelas I caturwulan pertama, kemudian pokok bahasan ini diperluas dan diperdalam di kelas II caturwulan ketiga, di kelas III caturwulan pertama dan di kelas IV caturwulan pertama.

2. Juga dalam Kurikulum 1984 setiap sila dari Pancasila dibicarakan di setiap tingkat di SD, misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimulai di kelas I kemudian terus diperdalam di kelas-kelas lanjutannya, kelas II sampai dengan kelas VI. Seperti diuraikan di atas ketiga puluh enam butir R₄ dijadikan Tujuan Instruksional Umum di Sekolah Dasar.

4. Pengembangan Bahan Belajar

Bahan belajar PMP baik dalam periode berlakunya Kurikulum 1975 maupun dalam periode Kurikulum 1984 dilengkapi dengan Buku Kurikulum, Buku Murid, dan Buku Pedoman Guru. Semua bahan belajar ini dikembangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku Kurikulum PMP terdiri dari Buku I yang berisi Ketentuan-Ketentuan Pokok yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Dasar serta Penjelasan Umum. Di samping Buku I terdapat Buku II yang berisi Garis-Garis Besar Program Pengajaran PMP dan Buku III yang antara lain berisi Pedoman Penilaian, interakal belajar mengajar, dan Pedoman Pengembangan Sistem Intruksional. Buku kurikulum ini sangat membantu Kepala Sekolah dan guru dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar PMP. Jumlah buku ini terbatas yaitu satu set untuk setiap sekolah. Dengan demikian satu set buku kurikulum ini digunakan oleh semua guru dan kepala sekolah di sekolah itu.

Buku murid adalah satu-satunya buku wajib yang digunakan di Sekolah Dasar. Ada satu jilid buku PMP untuk setiap kelas. Buku murid diperoleh secara cuma-cuma oleh setiap murid. Buku wajib ini dikembangkan oleh Pemerintah C.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain buku wajib, bermacam-macam buku PMP beredar bebas di pasaran yang dikembangkan oleh penulis swasta. Semua buku ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Perbedaannya pada umumnya dalam metoda penyajian.

adalah lulusan Sekolah Pendidikan Guru atau KPG. Mereka tidak dididik secara khusus untuk mengajar RMP karena di SPG tidak ada jurusan RMP. Dalam keadaan seperti ini dan mengingat lagi bahwa RMP adalah bidang studi yang baru dikembangkan, yaitu sesudah Orde Baru maka pendidikan semasa bertugas (inservice training) sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pengajaran RMP. Mengingat lagi bahwa RMP merupakan mata pelajaran yang langsung mengembangkan dari membina manusia pembangunan yang berwatak Pancasila, sesuai dengan Keputusan MPR sejak Orde Baru maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk satu tim khusus yang mengembangkan RMP. Tim ini mengembangkan program, sarana, dan tenaga yang khusus menangani RMP di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam pengembangan tenaga pengajar RMP telah diselenggarakan penataran guru, Kepala Sekolah, Perilik dan pejabat Kantor Depdikbud. Penataran ini diselenggarakan di tingkat pusat dan daerah. Hampir setiap penataran yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikdasmen selalu mencantumkan tatanan RMP atau P4. Menjadi suatu keharusan bahwa setiap anggota masyarakat terutama karyawan negeri maupun swasta untuk mengikuti pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa). Dengan demikian jelaslah bahwa pengembangan tenaga pengajar maupun tenaga administratif lainnya yang berkecimpung dalam pendidikan telah mendapat bahan yang cukup untuk mengembangkan dan membina pelajaran RMP.

Di tingkat pendidikan setelah SLTA telah dikembangkan program yang menjurus pada pendalaman RMP misalnya telah dibuka program DI, DII, DIII dan SI Kependidikan RMP, sehingga guru-guru lulusan program tersebut telah mengkhususkan diri untuk mendalami RMP. Salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi yang banyak memikirkan pengembangan dan pembinaan Pendidikan Pancasila ini adalah IKIP Malang, di mana pada awal berdirinya Orde Baru telah dibentuk laboratorium Pancasila yang

diprakarsai oleh Prof. Dardji Danmodihardjo SH yang kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Metodologi Belajar Mengajar

Perkembangan metodologi (proses) belajar mengajar dalam PMP disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang studi tersebut. Pada tabel 4 dicantumkan metodologi yang dianjurkan untuk dipakai masing-masing periode Kurikulum 1968, periode Kurikulum 1975, dan periode Kurikulum 1984. Pada tabel tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan usaha penghayatan Pancasila ialah dengan jalan:

"Kejelasan ide yang tercakup dalam nilai Pancasila menumbuhkan kepekaan, kemauan dan tindakan pada diri si anak didik terhadap ajaran Pancasila, dan tiap-tiap tindakan belajar si anak didik tentang PMP selalu diarahkan untuk menjalin hubungan antara anak didik dengan ajaran Pancasila".

Buku pegangan guru selain Buku II telah banyak dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah buku pedoman guru antara lain Pedoman Metode Penyajian dan Cara Penerapannya. Demikian juga banyak jenis buku RMP yang diterbitkan oleh pihak swasta yang dapat digunakan sebagai pegangan mengajar bagi guru, baik guru SD maupun guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas. Buku tersebut antara lain: Bahan Penataran RMP, Mengenal Pendidikan Moral Pancasila, Pancasila Suatu Orientasi Singkat dan sebagainya.

Selain bahan belajar yang berupa buku telah pula dikembangkan bahan belajar berbentuk gambar dan foto dan alat peraga yang banyak hubungannya dengan RMP. Di antara gambar atau foto tersebut banyak digunakan dalam mempelajari RMP melalui permainan.

Prosedur yang ditempuh dalam pengembangan buku murid adalah:

1. Pembentukan kelompok pengarah, yang tugasnya memberikan nasihat/bimbingan tentang bagaimana sebaiknya buku tersebut disusun untuk mencapai tujuannya.
2. Pembentukan kelompok penulis yang terdiri dari dosen perguruan tinggi beserta guru-guru yang berpengalaman yang bertugas untuk menyusun kerangka buku dan selanjutnya menulis naskah buku.
3. Pembentukan kelompok penilai yang terdiri dari dosen perguruan tinggi beserta guru yang berpengalaman yang bertugas untuk mengadakan penilaian terhadap naskah buku RMP.
4. Pembentukan kelompok penyunting yang terdiri dari ahli bahasa untuk membetulkan kaidah-kaidah bahasa yang kurang tepat.
5. Konsultasi materi RMP kepada Pejabat Tinggi Negara seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penerangan dan BP7.
6. Penelitian terakhir oleh Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang pada akhirnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 4
Metodologi Dalam Pendidikan Moral Pancasila

KURIKULUM 1968	KURIKULUM 1975	KURIKULUM 1984
<p>Pendidikan Kewargaan Negara di SD merupakan jalinan (korelasi) unsur (segi pendidikan), ilmu bumi, sejarah dan pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam memberikan pendidikan Kewargaan Negara kepada murid-murid SD dapat dimulai dari salah satu unsur tersebut di atas. Pada setiap unsur yang dipergunakan sebagai titik tolak tersebut selalu dijalinan dengan unsur yang lain sehingga Pendidikan Kewargaan Negara merupakan kesatuan pengertian.</p>	<p>Pendidikan Moral Pancasila dimaksudkan untuk membawa seseorang untuk menghayati Pancasila, maka kepekaanlah yang harus menjadi masalah pokoknya, dan bukan hanya masalah dibafalkan, dianut, dipertahankan dan dibelanya perumusan kata-kata dalam Pancasila. Karena betapapun jelasnya sebuah ide dirumuskan, betapapun kerasnya disiplin yang digunakan untuk menyesuaikan tindakan dengan ide itu, namun tanpa adanya kepekaan, maka apapun usaha yang kita lakukan akan sia-sia dan bahkan akan membawa konflik dan kemunafikan saja dalam kehidupan kita sehari-hari.</p> <p>Untuk mewujudkan usaha penghayatan Pancasila oleh anak didik kita ialah dengan jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan (penggambaran) ide yang tercakup dalam nilai Pancasila. 2. Menumbuhkan kepekaan, kecauan, dan tindakan pada diri si anak didik terhadap ajaran Pancasila. 3. Tiap-tiap tindakan belajar si anak didik tentang RMP selalu diarahkan untuk menjalin hubungan antara anak didik dengan ajaran Pancasila. 	<p>Metode apapun yang digunakan dalam pelaksanaan program RMP hendaknya dapat menjamin pengembangan seluruh ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan terutama pengembangan ranah sikap, moral, mental, nilai-nilai Pancasila bagi anak didik. Memilih dan menerapkan metode penyajian yang ada dan yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum dewasa ini hendaknya dilandasi oleh sistem among yang mengutamakan azas dan suasana interaksi-interaksi edukatif bersifat kekeluargaan dan kasih sayang. Guru RMP seharusnya dapat memilih secara seksama dan menentukan metode pendidikan secara beragam dan tepatguna. Di antara metode mengajar yang disarankan adalah: bercerita/ceramah, tanya jawab, persuasi kar-yawisata, penegasan, pembinaan nilai, diskusi, bermain peran, inkuiri, permainan dan simulasi, serta nyanyian.</p>

Dalam Kurikulum 1984 secara gamblang dinyatakan bahwa metode "hendaknya dilandasi oleh sistem among yang mengutamakan azas dan suasana interaksi-interaksi edukatif yang bersifat kekeluargaan dan kasih sayang".

Dalam penerapannya di kelas metodologi di atas dijabarkan menjadi:

1. Penyajian dari satu kelas ke kelas berikutnya didasarkan pada pendekatan spiral (spiral approach) sehingga apa yang telah dipelajari di kelas yang lebih rendah diulang kembali sambil mendalami pengertian dan memberi contoh nyata yang diangkat dari peristiwa lingkungan, sehingga ide yang tercantum dalam Pancasila semakin jelas.
2. Penyajian konsep dan nilai yang terkandung di dalamnya diupayakan agar diterapkan dalam kehidupan anak didik sehari-hari. Untuk ini dianjurkan untuk menggunakan metoda mengajar yang bervariasi mulai dari metoda konvensional (seperti ceramah, tanya jawab), metoda belajar siswa aktif (seperti inkuiri, diskusi, bermain peran, permainan dan simulasi) sampai kepada metoda belajar sambil bernyanyi (khusus untuk kelas-kelas rendah dikembangkan nyanyian yang isinya mengandung pengembangan jiwa Pancasila).

Model untuk setiap jenis metode mengajar dengan menggunakan berbagai bahan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam buku yang berjudul Pedoman metode Penyajian RMP dan Penerapannya.

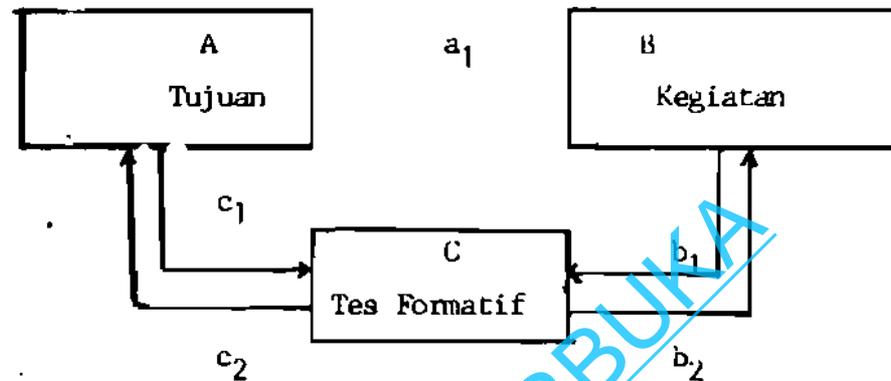
7. Evaluasi dan Remediasi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Mendikbud No. 008-C/U/1975 tertanggal 17 - 1 - 1975 tentang Pembakuan Kurikulum SD, khususnya Bab I, Pasal 1.c yang menyatakan:

"Guru diharuskan mempersiapkan bahan pengajaran sesuai dengan Program Pengajaran Sistem Instruksional.

Dalam persiapan tersebut harus dicantumkan antara lain, Tujuan

Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Metode Mengajar, Kegiatan dan Penilaian Formatif (evaluasi). Dalam persiapan ini harus jelas dituliskan hubungan antara TIU/TIK, Kegiatan Belajar dan Penilaian Formatif seperti tercantum pada gambar di bawah ini:



Gambar 1: Hubungan Tujuan dengan Kegiatan dan Penilaian Formatif.

Gambar di atas menunjukkan bahwa:

1. Pada waktu tujuan instruksional Umum dan Khusus dikembangkan, langsung kegiatan dikembangkan (a_1) yang berbentuk Kegiatan B. Pada saat yang sama dikembangkan pula alat penilaian (c_1) yang berupa Tes Formatif C.
2. Setelah kegiatan B dilaksanakan Tes, Formatif C diadministrasikan (b_1).
3. Hasil Tes Formatif diperiksa dan diolah kemudian dilihat apakah tujuan instruksional telah dicapai (c_2).
4. Jika ternyata TIU/TIK belum dicapai dengan baik harus diadakan perbaikan (remediasi) dalam kegiatan proses belajar mengajar (b_2).
5. Perbaikan dalam Kegiatan B diharapkan akan dapat memperbaiki tingkat penguasaan siswa.

Dari uraian ini dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan evaluasi mempunyai fungsi untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan pelajaran yang direncanakan. Sekiranya tujuan belum dicapai dengan baik harus

segera diadakan remediasi kegiatan belajar.

Selain pelaksanaan tes formatif juga dilaksanakan tes sumatif pada akhir unit pelajaran. Tes ini terutama untuk menentukan nilai siswa sebagai nilai akhir catur wulan yang dicantumkan dalam buku rapor.

Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian siswa pada umumnya adalah tes hasil belajar, dan karena PMP titik beratnya mengembangkan ranah afektif maka untuk menentukan perkembangan nilai dan sikap yang berhasil dibina melalui PMP digunakan format observasi yang berupa rating scale atau check list.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

KAITAN KURIKULUM RMP DI SEKOLAH DASAR

Sesuai dengan Keputusan Lembaga Tertinggi Negara yang dituangkan dalam TAP MPR yang menyatakan bahwa RMP diberikan kepada semua siswa mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas maka di bawah ini akan diuraikan kaitan Kurikulum RMP antar kelas, antar disiplin, dan antar jenjang.

1. Kaitan Kurikulum RMP Antar Kelas

Pada Bab II bagian 3 yaitu mengenai Garis-Garis Besar Program Pengajaran telah dikemukakan bahwa pendekatan pengembangan program RMP yang digunakan adalah pendekatan spiral yaitu apa yang telah diberikan di kelas rendah diulang lagi dengan memperdalam dan merinci bahan tersebut. Dengan kata lain erat kaitannya antar bahan yang diajarkan di kelas yang lebih tinggi dengan kelas di bawahnya. Pengulangan ini adalah untuk lebih menantapkan dan menghayati nilai-nilai positif yang terkandung dalam RMP.

2. Kaitan Kurikulum RMP Antar Disiplin

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kata Pengantar GBPP-RMP Kurikulum 1975 menyatakan bahwa:

"Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya dibebankan kepada bidang pelajaran RMP di dalam pencapaiannya melainkan juga kepada bidang pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi) dan Pendidikan Agama".

Dengan kutipan di atas dapatlah diketahui bahwa RMP mempunyai kaitan yang sangat erat dengan bidang studi tertentu terutama Pendidikan Agama, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Kedua bidang studi dilihat dari materi bidang studinya mempunyai misi yang sejalan dengan PMP yaitu pengektangan watak seseorang menuju pembentukan manusia Pancasila. IPS terutama sejarah, tata negara banyak membicarakan perjuangan bangsa, wawasan nusantara, kepahlawanan, sedangkan Pendidikan Agama memberi keteladanan tentang tingkah laku yang terpuji yang mendapat ganjaran di dunia maupun hari kemudian. Bidang studi lain pada pokok bahasan/sub pokok bahasan tertentu dapat digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Bukankah melalui pelajaran IPA dapat dikagumi bagaimana besarnya kekuasaan Tuhan itu. Demikian pula melalui pelajaran Ekonomi dapat dikembangkan sikap menabung atau sikap sosial.

3. Kaitan Kurikulum PMP-SD Dengan Kurikulum Pada Jenjang Sekolah Menengah

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa pokok bahasan yang diberikan di kelas 3-SD, kelas 1-SMP dan kelas 1-SMA semuanya bersumber pada sila dari Pancasila. Pokok bahasan pada masing-masing jenjang masih ada yang diulang dengan pengertian bahwa pembahasan pada jenjang yang lebih tinggi dibuat lebih terinci dan mendalam serta memerlukan nalar yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada pokok bahasan pertama pada Tabel 5 dimana di setiap jenjang dibahas sila pertama Pancasila. Begitu juga pokok bahasan kedua, keempat dan ketiga pada SD, SMP dan SMA kesemuanya membahas tentang sila kedua Pancasila.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyajian dengan pendekatan spiral yang berlaku antar kelas di SD diterapkan juga antar jenjang mulai dari sekolah dasar sampai pada sekolah menengah tingkat pertama dan atas.

Tabel 5

Pokok Bahasan Yang Terdapat Dalam Buku Wajib RMP
SD, SMP, DAN SMA

NO	POKOK BAHASAN DALAM BUKU WAJIB KELAS 3-SD	POKOK BAHASAN DALAM BUKU WAJIB KELAS 1-SMP	POKOK BAHASAN DALAM BUKU WAJIB KELAS 1-SMA
1.	PERCAYA DAN TAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA	AGAMA-AGAMA DI INDONESIA	MEMBINA KEHIDUPAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA
2.	MENGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA	KERJA SAMA ANDAR UMAT BERAGAMA	MEMBINA PERSAHABATAN ANDAR BANGSA
3.	HAK DAN KEWAJIBAN BANGSA INDONESIA	DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PANCASILA	MENGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA
4.	MENAATI TATA TERtib	PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA	MEMUPUK SEMANGAT PROKLAMASI DAN JiWA SERDA NILAI-NILAI 1945
5.	MEMBANGUN DAN GUTUNG RUYUNG	HAK-HAK AZASI MANUSIA DALAM UUD 1945	KESAKTIAN PANCASILA
6.	-	PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	KEHANGKITAN ORDE BARU
7.	-	PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA	PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
8.	-	UNDANG-UNDANG DASAR 1945	LEMBAGA NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH MENURUI UUD 1945
9.	-	-	MEWUJUDKAN KEMAJUAN YANG MERATA DAN KEADILAN SOSIAL

BAB IV**KAITAN KURIKULUM PMP DENGAN BAHAN BELAJAR DI SD**

Buku paket yang digunakan di sekolah diterbitkan pada tahun delapan puluhan. Naskah buku tersebut telah dikembangkan pada akhir tahun tujuh puluhan. Sampai sekarang sudah ada edisi kedua, di mana pada cetakan kedua ini telah diadakan beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan ini didasarkan pada hasil penelitian Tim Penulis dan pengarahan Presiden Republik Indonesia. Penyempurnaan ini dilakukan adalah untuk membuat agar bahan yang disajikan menjadi lebih mantap seperti diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kata Pengantar Cetakan Kedua bahwa penyempurnaan yang dilakukan:

- "1. berupa hasil penelitian Tim Penulis yang ralatnya sudah pernah diedarkan kepada penakai buku ini pada tanggal 21 Juli 1981;
2. berdasarkan pengarahan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh satu tim perbaikan di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet"

Materi buku paket ini sesuai dengan materi GBPP PMP Kurikulum 1975 seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini (Buku Paket Kela III diambil sebaga sampel).

Tabel 6

Kaitan Kurikulum RMP Dengan Buku Paket Kelas III SD

NO KURIKULUM 1975 KELAS III	POKOK BAHASAN DALAM BUKU PAKET KELAS III
1. Hubungan Manusia dengan Tuhan YME	Percaya dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Toleransi hidup beragama	Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
3. Hak berbicara	Hak dan Kewajiban Bangsa Indonesia
4. Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh	Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh (sub pokok bahasan)
5. Peraturan Tata Tertib Dalam Kehidupan Masyarakat/Negara	Mentaati Tata Tertib
6. Kehidupan Gotong Roong Dalam Masyarakat sekitarnya.	Membangun dan Gotong Royong.

Dengan diberlakukannya Kurikulum 1984, di mana Tujuan Instruksional Umumnya adalah ketiga puluh enam butir nilai dan norma yang terkandung dalam Ekaprasetya Pancakarsa, maka materi buku paket perlu diadakan peninjauan kembali. Mengingat penulisan buku paket didasarkan pada Kurikulum 1975 dan Kurikulum tersebut telah disesuaikan dengan TAP MPK maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara isi buku paket yang ada sekarang dengan Kurikulum 1984.

BAB V

KETERKAITAN ANTARA KURIKULUM DAN PUTUSAN LEMBAGA TERTINGGI

Seperti diuraikan pada Bab I bahwa setiap perubahan dalam keputusan politis yang diambil oleh Lembaga Tertinggi Negara, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selalu diikuti dengan tindakan penyesuaian Kurikulum. Misalnya pada TAP MPR No. II/MPR/1978 telah ditetapkan Nilai dan Norma-Norma yang terkandung dalam P4 yang berupa Ekaprasetia Pancakarsa maka pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kembali Kurikulum 1975 dan memutuskan untuk membentuk Kurikulum baru yaitu Kurikulum 1984. Struktur Kurikulum 1984 berbeda dibandingkan dengan Kurikulum 1975 dan materinya lebih terinci.

Namun demikian pernah juga terjadi perubahan politis oleh Lembaga Tertinggi tidak sempat mengubah materi Kurikulum seperti yang terjadi dengan Keputusan MPRS tahun 1966, tetapi materi/bahan yang disajikan dalam buku pelajaran berubah sama sekali disesuaikan dengan Ketetapan MPRS. Pada waktu itu situasi politis sangat hangat dan sensitif yaitu saat perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Adanya putusan Orde Baru yang demikian disambut oleh masyarakat secara spontan, dan semua yang berbau Orde Lama serta merta ditinggalkan dan diganti dengan semangat Orde Baru termasuk di dalamnya penggantian materi Pendidikan Kewargaan Negara menjadi materi yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keterkaitan antara Kurikulum RPP dengan Keputusan Lembaga Tertinggi benar-benar harus menyatu, karena fungsi RPP yang khas yaitu menciptakan manusia pembangunan yang berjiwa dan berpandangan Pancasila. Ini menyangkut harkat keperibadian manusia Indonesia yang tidak dapat ditawar, karena pengalaman menunjukkan bahwa dengan pengamalan dan penghayatan Pancasila bangsa Indonesia mampu menghadapi bermacam tantangan yang berat. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB VI

KOMENTAR

Bab ini adalah bagian terakhir dari tulisan ini, mengandung beberapa hal yang berkenaan dengan kesimpulan umum, beberapa saran, dan beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dikemukakan dengan harapan, agar diadakan penelitian untuk menjawab masalah-masalah dalam pertanyaan tersebut.

Kesimpulan

1. Sejak berdirinya Orde Baru, upaya untuk menerapkan ideologi Pancasila dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia telah dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah kursus dan penataran, jalur non formal seperti Program paket A dan jalur informal antara lain, majalah, televisi dan radio. Semua hasil pemikiran para pemimpin bangsa baik yang memegang kendali pemerintahan maupun yang menjabat di Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara telah dituangkan dalam bentuk keputusan dan dalam penerapannya telah dicantumkan dalam kurikulum sekolah.
2. Bahan pelajaran PMP di tingkat sekolah dasar dan menengah berupa buku paket telah banyak diterbitkan oleh pemerintah sehingga cukup untuk setiap murid. Materi buku paket telah disesuaikan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Buku Paket merupakan buku wajib untuk Sekolah Dasar di seluruh Nusantara, materi Pancasila yang harus dihayati dan diamalkan oleh siswa SD telah standar. Diminta guru secara kreatif memasukkan unsur-unsur daerah ke dalam materi pelajaran Pancasila.

4. Walaupun telah banyak upaya telah dilaksanakan dalam pengembangan dan pembinaan PMP namun karena ini menyentuh hati nurani yang perwujudannya dalam sikap manusia, memerlukan waktu dan upaya yang lebih banyak dibandingkan dengan pembinaan pengembangan ranah keterampilan dan ranah kognitif.

Saran-saran

5. Membuat buku paket baru dalam rangka penyesuaian buku paket yang ada sekarang dengan kurikulum 1984, selain memakan waktu yang panjang, juga memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu sekiranya buku paket yang ada sekarang kurang sesuai dengan kurikulum 1984, maka hal-hal yang kurang sesuai itu sebaiknya berupa suplemen pada buku paket yang dipakai sekarang.
6. Dalam Metodologi belajar mengajar PMP dinyatakan bahwa kunci keberhasilan menanamkan kepribadian Pancasila adalah melalui keteladanan, di mana guru harus menyadari bahwa dia pribadi merupakan contoh nyata bagi siswa-siswanya mengenai manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Dan pribadi guru PMP masih perlu dibina dan dikembangkan sehingga dapat dijadikan panutan bagi siswanya dan masyarakat di sekelilingnya.

Pertanyaan Penelitian

7. Komponen kurikulum PMP telah banyak yang telah dikembangkan antara lain, Kurikulum PMP Buku I, Buku II, Buku III, dan Pedoman mengajar; sejauh manakah buku-buku ini telah dimiliki oleh semua sekolah, guru dan pejabat Kantor Depdikbud dan sejauhmana kurikulum tersebut dapat diterapkan di dalam kelas.

8. Telah banyak pula buku RMP yang dapat dijadikan sebagai buku pegangan mengajar bagi guru baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sejauhmanakah buku-buku ini membawa dampak positif terhadap pengembangan dan pembinaan manusia Pancasila.
9. Walaupun pemerintah telah menerbitkan buku Pedoman Metode Pengajaran RMP dan penerapannya, masih perlu diadakan penelitian apakah metode dalam pedoman tersebut dapat dilaksanakan di sekolah dilihat dari berbagai aspek seperti:
 - a. Apakah pesan dalam pedoman tersebut dapat dilaksanakan guru di lapangan.
 - b. Sejauh mana pelaksanaan metode tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
 - c. Sejauh mana pedoman tersebut memberi dampak positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional khususnya RMP.
10. Sejauh mana guru dapat membuat persiapan mengajar sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Aspek apa saja yang dimasukkan dalam persiapan tersebut.
11. Sejauh mana tes formatif telah dilaksanakan di kelas, untuk apa saja hasil tes formatif ini digunakan. Bahan remediasi apa saja yang dikembangkan guru untuk meningkatkan penguasaan materi pelajaran.
12. Sejauh mana guru telah mampu mengembangkan, mengadministrasikan dan mengolah butir tes yang mengukur ranah efektif seperti "chek list" atau "rating scale" seperti yang tercantum dalam buku pedoman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Anwar Yasin, 1983, Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia, Institut Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jakarta.
2. Darji Darmodihardjo, 1983, Pancasila, Suatu Orientasi Singkat, Arie lima, Jakarta.
3. Darji Darmodihardjo, et al, 1985, Bahan Penataran PMP, Dinoyo Press, Malang.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1968, Kurikulum Sekolah Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Jakarta.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, Kurikulum Sekolah Dasar, PN Balai Pustaka, Jakarta.
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, Kurikulum SD, Garis-Garis Besar Program Pengajaran, Depdikbud, Jakarta.
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Pendidikan Moral Pancasila, SD kelas 1. Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
8. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Pendidikan Moral Pancasila, SD kelas 2. Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, Pendidikan Moral Pancasila, SD kelas 3. Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986, Kurikulum SD, Garis-Garis Besar Program Pengajaran, Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
11. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, Pendidikan Moral Pancasila Untuk SMP kelas 2, Ditjen Dikdasmen, Jakarta.
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, Pendidikan Moral Pancasila untuk SMA kelas 1, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, Pedoman Metode Penyajian PMP dan Penerapannya untuk Guru SD, Ditjen Dikdasmen, Jakarta.

14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Perencanaan Metode Penyajian Pendidikan Pancasilanya untuk Guru SD, Buku II, Balai Pustaka, Jakarta.
15. Laboratorium Pancasila, 1973, Pancasila, Kewargaan Negara untuk SD, IKIP Malang.
16. MPR, 1983, Garis-garis Besar Haluan Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
17. Sofyan Aman, 1985, Mengenal Pendidikan Moral Pancasila, Kucica, Jakarta.
18. Sutrisno Kutejo, et.al, 1968, Kita Anak Indonesia Baru, Mutiara Jakarta.

UNIVERSITAS TERBUKA